

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Lurah Pleret terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam situasi unik ini, Peneliti akan secara khusus berbicara tentang Kalurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Tata kelola desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip mendasar agar efektif. Akan lebih mudah untuk menentukan apakah tata kelola suatu struktur efektif jika acuan yang berfungsi sebagai indikator program telah dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 2014, disebutkan bahwa Desa merupakan suatu kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang guna untuk mengurus dan juga mengatur dalam urusan pemerintahan, dalam hak asal-usul, suatu kepentingan dalam masyarakat setempat yang juga berdasarkan dalam prakarsa masyarakat, serta menyangkut dalam hak-hak tradisional yang juga dapat dihormati dan diakui dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu kewenangan dalam pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah pusat menuntut pemerintah desa untuk mengurus dalam setiap urusan-urusan yang dapat berhubungan dengan masyarakat desa dan juga pemerintahan. Untuk melaksanakan suatu pembangunan dan pemerintahan yang maju guna untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sehingga juga diperlukan landasan-landasan yang kuat maka diperlukan juga pemberdayaan dan perlindungan desa untuk mencapai sebuah proses menuju ketatanegaraan Republik Indonesia, dikarenakan desa untuk era saat ini lebih bersifat mandiri dan demokratis. (S. P. Sari, 2014)

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional untuk memberikan peluang konsolidasi demokrasi dan efisiensi operasional negara. masyarakat menuju masyarakat sipil yang partisipatif. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan tingkat kolektif, sebagai perangkat pemerintah utama dan

mempunyai kontak langsung dengan daerah, perlu benar-benar berusaha sekuat tenaga memberikan bantuan kepada daerah agar pemerintahan tersebut benar-benar mengatasi permasalahan daerah. Penting bagi pemerintah kota/kecamatan untuk lebih meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan pekerjaan pemerintahan di tingkat kota/bawah..(Akil, 2019)

Mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk kesepakatan dimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diciptakan secara bersama dengan berbagai elemen-elemen yang ada di suatu wilayah. Tata pemerintahan yang baik ditingkat desa merupakan suatu bentuk kesepakatan tentang penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang dapat diciptakan secara bersama oleh suatu pemerintahan desa, kelembagaan desa, kelembagaan politik serta kelembagaan lainnya yang ada di desa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik biasanya merujuk pada suatu proses struktur kelembagaan yang ada di desa untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa (S. P. Sari, 2014)

Proses administrasi yang baik tercermin pada administrasi perintis. Seorang pionir adalah pemimpin kemajuan atau kekecewaan dalam memahami visi dan misi terbaik. Inisiatif Pemimpin sangat penting dalam menyatukan kebutuhan-kebutuhan lokal di wilayahnya.(M. P. Sari, 2022) Para pionir dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap orang-orang yang dipimpinnya dengan gaya regulasi yang sesuai dengan keinginan individu. Lembaga sosial dibingkai oleh wilayah setempat dan diberi tugas dan komitmen khusus. Lembaga sosial adalah kumpulan penghuni yang tinggal di suatu wilayah di sub-lokal yang bekerja sama secara langsung atau tidak langsung. Warga sendiri yang bermusyawarah membentuk kelompok penduduk ini, yang diakui dan diusung oleh pemerintah daerah.

Kepemerintahan dengan mewujudkan suatu tatanan yang baik (*good governance*) yang menjadi sebuah isu sentral dalam pembahasan yang paling utama dalam pengelolaan suatu pemerintahan, berbagai tuntutan-tuntutan yang jugadilakukan oleh setiap kalangan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik seperti searahnya dalam meningkatkan tingkat-tingkat dalam pengetahuan dan juga pentingnya pendidikan bagi masyarakat, selain dari pengaruhnya

globalisasi, yang mana tak terkecuali pada tingkatan pemerinthaan terendah seperti di desa. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan suatu konsep akhir untuk dipergunakan secara regular didalam ilmu politik itu sendiri. Adapun salah satu prinsip yang terkait dalam good governance merupakan suatu konsep-konsep yang juga begitu erat dalam kaitannya dengan meningkatkan pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat belum bisa memberikan kemudahan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, ada banyak berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat tidak malah secara efektif dan juga efisien. Dalam kondisi saat ini pelayanan publik yang diberikan cenderung sangat tidak memuaskan dan juga berbelit-belit dalam berbagai pelayanan publik, sehingga biasanya banyak memicu berbagai konflik.

Penerapan Good Governance pada tingkat desa adalah salah satu solusi canggih terhadap tata kelola Pemerintahan yang baik yaitu sebuah pemerintahan desa yang di pimpin oleh Lurah desa beserta perangkat desa, yg kurang berbasis kepada partisipasi rakyat dan transparansi, akuntabilitas, serta responsitas yg terbatas. sehingga dengan adanya penerapan prinsip Good Governance tak akan ada lagi kepemimpinan desa yang kindhearted, obligatory serta otoriter berasal kondisi struktur desa yang elit, sentralistik, dan feodal, kebalikannya akan timbul kepemimpinan sosial yang partisipatif, responsif dan demokratis. menggunakan adanya Great Administration masyarakat desa mempunyai ruang serta kapasitas yang leluasa buat bersuara, akses dan kontrol. dalam mendukung terwujudnya semua partisipasi, tugas dan kewenangan para aparat desa, dan menaikkan peran berasal kepala desa menjadi pemimpin pemerintahan desa, maka diharapkan adanya pembentukan atau penerapan tatakelola pemerintahan yg baik (Great Administration) ditingkat lokal mirip desa, agar tercipta kesejahteraan sosial, baik asal segi ekonomi, politik dan sosial. (Thomassawa & Lagantondo, 2021)

Maju atau tidaknya Republik Indonesia bergantung pada maju tidaknya desa dan jaringan kota, sehingga negara-negara pusat dan bersama-sama mempunyai pandangan yang sama untuk menjadikan desa sebagai pemimpin pembangunan. Peranan desa begitu besar dalam mempercepat pembangunan oleh karena itu pemerintah telah menetapkan strategi-strategi yang diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, bertujuan

untuk mengangkat kota pada kedudukan pokok dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Menyadari pemerintahan desa mempunyai tugas dan kewajiban, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,
- b. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- c. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan,
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan didesa
- f. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Undang-undang sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa tidak lepas dari peran menciptakan tata kelola desa yang baik. Ungkapan luhur tersebut menyatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas berhasil tidaknya suatu pekerjaan dan menempatkan kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi pada kedudukan yang paling penting; dengan kata lain kepemimpinan kepala desa menempati posisi penting dalam rangka menciptakan pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengurus setiap urusan yang ada di desa, Kepala Desa memiliki tugas dalam memimpin dan juga menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa dan kinerja Kepala Desa akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan dimaksudkan untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang hanya pada satu tangan. Secara yuridis formal, kedudukan tertinggi yang berada di desa dipimpin oleh kepala Desa, tetapi melihat realitas yang ada yaitusumber-sumber kekuasaan yang ada di desa sangatlah beragam. Begitu pula dengan tradisi dan budaya yang ada di desa merupakan pembentukan pola pikir masyarakat desa.

Secara legitimasi upaya Kepala Desa dalam mempertahankan kekuasaan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan. Legitimasi mempunyai kaitan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Legitimasi bukanlah suatu paksaan, seperti fisik maupun non fisik melainkan sebuah pengakuan dari masyarakat (yang dipimpin)terhadap

sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Surbakti mengelompokkan cara-cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi yaitu *symbolis, procedural, dan materiil* (Surbakti, 1984:96).

Kalurahan Pleret merupakan Kalurahan yang berada di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, dalam hal ini Taufiq Kamal selaku Lurah Pleret berhasil menjadikan Kalurahan Pleret sebagai Desa Digitalisasi. Selain itu, salah satu kunci utama keberhasilan Kalurahan Pleret dalam menjaga diri dari korupsi adalah transparansi. Setiap anggaran dan program yang dijalankan selalu diumumkan secara terbuka, baik melalui papan pengumuman di kantor kalurahan maupun melalui media sosial resmi. Hal ini memungkinkan warga untuk memantau dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, partisipasi publik juga menjadi pilar penting dalam tata kelola Kalurahan Pleret. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi program-program pembangunan. Forum-forum warga rutin diadakan untuk mendiskusikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak warga.

Dikutip asal website pandangan jogja, Kalurahan Pleret semenjak jadi juara satu lomba Kalurahan tingkat Provinsi DIY pada Juli tahun 2022 kemudian serta maju ke taraf regional/nasional Jawa-Bali, jadwal kedatangan kalurahan berasal semua Indonesia ke Pleret, makin padat. Pleret di bawah kepemimpinan Taufiq membangun dan mengembangkan digitalisasi serta pariwisata secara masif. menggunakan digitalisasi, Pleret juara lomba desa tingkat provinsi serta sekarang melaju ke level nasional. menggunakan Gerbang Pleret, Pleret sukses mendapat kucuran Danais (Dana Keistimewaan) sebesar Rp 2,1 miliar.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kepemimpinan yg dilakukan oleh kepala kalurahan dalam membangun Tata kelola pemerintahan yg baik.oleh sebab itu, judul skripsi ini adalah **“Peran Kepemimpinan Lurah Pleret Dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Menuju Good Governance”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepemimpinan Lurah Pleret dalam membangun dan mengembangkan tata kelola pemerintahan menuju Good Governance?
2. Apa faktor pendorong dan penghambatan dalam membangun tata kelola pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala kelurahan pleret dalam membangun dan mengembangkan tata kelola pemerintahan menuju Good Governance.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat dari Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pelajar dan segelintir kalangan yang berminat membaca ujian ini serta untuk menjalankan berbagai sifat dan batasan di berbagai bagian kewenangan sehingga nantinya diharapkan juga memiliki pilihan untuk lebih mudah memahami jenis inisiatif yang dilakukan, khususnya oleh pimpinan mana pun. . Berikut ini adalah keuntungan teoretis, akademis, dan praktis dalam skenario ini::

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat yg bersumber dari keilmuan, khususnya dalam pengembangan dan banyak sekali aspek-aspek terkait dalam pengetahuan ilmu pemerintahan mengenai kiprah pemimpin kalurahan. Selain itu dari aneka macam sudut pandang pada penelitian ini diperlukan mampu berguna pada banyak sekali bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yg pula melakukan penelitian terkait peran kepemimpinan lainnya terutama yg pula berhubungan menggunakan penelitian ini.

2. Secara akademis, manfaat akademis yang dapat diambil berasal penelitian ini yaitu, supaya bisa menjadi tolak ukur atau acuan mahasiswa universitas muhammadiyah yogyakarta atau pula kampus lainnya yg meneliti terkait dengan kiprah kepemimpinan yang mampu digunakan sebagai surat keterangan pada melakukan aneka macam penelitian-penelitian selanjutnya yg pula berhubungan dengan peran kepemimpinan khususnya kepala kalurahan.
3. Secara Praktis, Penelitian ini dibutuhkan bisa menyampaikan surat keterangan dan pemahaman yg mendalam perihal kiprah kepemimpinan kepala kalurahan pada membangun tata kelola pemerintah menuju good governance, supaya kalurahan yg mereka pimpin bisa lebih baik asal sebelumnya.

E. Tinjauan pustaka

penelitian ini penulis akan coba kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Tomassawa & lagantondo (2020), dalam artikel ilmiahnya, dia menyebutkan bahwa prinsip-prinsip mewujudkan good governance ialah transparansi, partisipasi, supremasi aturan, dan responsif. Landasan utama demokrasi dan tata pemerintahan yg baik artinya tata kelola yang baik, khususnya pada pemerintahan desa dan bagaimana ketua desa dapat melaksanakan kebijakan serta pelayanan kepada warga . Temuan penelitian ini memberikan bahwa kepala desa Sintuwulemba sudah menjalankan kepemimpinan demokratis pada menjalankan pemerintahannya.(Thomassawa & Lagantondo, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (M. P. Sari, 2022), dengan judul penelitian **“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dalam Memotivasi Kinerja Pengelola Lembaga Masyarakat Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan”** Hal ini menjadi alasan mengapa upaya Lurah untuk bekerja sama dengan bawahannya untuk melibatkan wilayah setempat belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama dengan masyarakat yang belum terberdayakan dan dimobilisasi secara maksimal, dan kerjasama yang dilakukan selama ini hanya melibatkan bawahan saja. Dia menambahkan bahwa masyarakat setempat pada umumnya mempertimbangkan untuk

menjangkau dan didorong oleh uang. Kerja sama telah dilakukan dengan baik, namun terdapat permasalahan seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, camat juga belum mampu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang hidupnya harus diberdayakan dan diakomodasi. Sebab, kawasan sekitarnya belum banyak berinvestasi. Kemudian, kewajiban walikota di kota Pahlawan dikurangi dalam memberikan arahan kepada organisasi-organisasi terdekat karena pendiriannya digariskan dan disusun oleh masyarakat, sehingga pemerintah kota tidak melakukan hal tersebut. menggagalkan asosiasi ini. Keluarga hanya mendapatkan oleh-oleh dari daerah setempat yang diberikan kepada instansi setempat sesuai dengan kebutuhannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Mustanir,Zainuddin Samad,Abdul Jabbar,Monalisa Ibrahim, 2019) dengan judul “**Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang**” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa di Desa Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan advokasi terhadap pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian kuantitatif dan deskriptif. Contoh dalam pemeriksaannya adalah 96 orang masyarakat setempat yang menggunakan metode purposive test dengan menggunakan resep Slovin. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dinilai cukup baik sebesar 45,17 persen, pemberdayaan masyarakat dinilai buruk sebesar 39,6 persen, dan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Berdasarkan data keluaran tabel rangkuman R2, terlihat bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 13,3%, dan sisanya sebesar 86,7% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar cakupan penelitian.

Menurut (Akil, 2019), dengan judul penelitian “**pengaruh gaya kepemimpinan kepala kelurahan duampanua kecamatan baranti kabupaten sidrap terhadap kinerja pembangunan**” Faktor pendukung gaya kepemimpinan Kepala Desa adalah sebagai berikut: (1) pengalaman pemimpin, yang dalam hal ini meliputi latar belakang pendidikan, kepribadian, dan nilai-nilai pemimpin; (2) motivasi kerja pegawai; dan (3) disiplin kerja pegawai. mengenai pekerjaannya dan tingginya kinerja pegawai Desa Duampanua dalam menjalankan pekerjaannya. 75% karyawan mempunyai kinerja tinggi, sedangkan 75%

sisanya mempunyai kinerja rata-rata. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gaya pemerintahan Kepala Kota adalah: Kualitas pekerja, iklim hierarki.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sanur, 2023) dengan judul penelitian **“Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”** Artikel ini akan menganalisis perkembangan desa setelah adanya Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perbaikan, terutama dalam hal kemajuan di tingkat kota serta peningkatan kerangka desa dan perekonomian. Diketahui, Kementerian Desa telah menetapkan sejumlah indikator pembangunan desa yang memudahkan desa dalam menentukan tingkat kemandiriannya. Instrumen ini dikenal dengan nama Creating Town List (IDM). Sementara itu, untuk menjadi desa yang maju dan bebas, ada beberapa proyek dan kemajuan yang dapat diciptakan oleh kota tersebut. Demokrasi dan kemandirian bagi desa merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Keduanya mempersiapkan kota-kota untuk memiliki hak istimewa untuk mengawasi aset-aset biasa atau membagi aset untuk mengerjakan layanan-layanan penting dan mendorong perekonomian daerah. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengefektifkan pembangunan kota sesuai Peraturan desa adalah terus membentengi sistem berbasis suara kota melalui tingkat kerjasama lokal, memperluas IDM desa, dan mampu membuat produk-produk serius.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kamarasyid, 2019) dengan judul penelitian **“Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah”** Dalam Artikel ini memperjelas bahwa upaya untuk mencapai tingkat efektivitas kerja yang otoritatif memerlukan perluasan pelaksanaan yang representatif. Agar kepemimpinan seorang pemimpin dianggap berhasil, ia harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kecerdasan, kedewasaan, hubungan sosial yang luas, motivasi dan dorongan untuk berprestasi, sikap terhadap hubungan antarmanusia, fokus pada tugas dan wewenang, kejujuran dan keterbukaan. , demokratis dan administratif, berpartisipasi dan bertanggung jawab. Sementara itu, untuk standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya ada beberapa hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan, antara lain: Tanggung Jawab, Keterusterangan, Transparansi, Keyakinan yang Sah, Jaminan, Kerja Sama (Organisasi), Desentralisasi, Keahlian dan Korespondensi. , Layak dan mahir, Efisiensi dan Kualitas kerja.

Menurut (Pelu et al., 2023) didalam artikel ilmiahnya yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah”** Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian Hilla kurang transparan, lambat, dan kurang akuntabilitas. Sehingga terselenggaranya pemerintahan yang baik dapat memberikan kemajuan pada bagian-bagian pemerintahan pada daerah setempat. Penemuan eksplorasi tersebut adalah (1). Tanggung jawab, investasi, kepolisian menjadi salah satu bentuk kemajuan demi kemajuan Negeri Hilla. (2). Untuk pertumbuhan ke depan, sinergi dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah harus dibangun dngan komunikasi kelembagaan yang baik dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyiah & Rahayu, 2023) dengan judul penelitian **“Analisis Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang Banten”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan good governance di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten. Sebab, belum cukup sinergitas antara Bupati yang membawahi, camat yang menjadi pelaksana dan pemimpin di kecamatan, serta masyarakat. Akibat dari eksplorasi tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhambat oleh rendahnya kualitas perkantoran dan pondasi, baik perangkat mekanik maupun SDM, lemahnya pelaksana pemerintahan di siang hari bolong, lemahnya kualitas dan keterbatasan kewenangan pemerintahan di Daerah Sindangresmi serta tidak adanya pembinaan pegawai pemerintah di Daerah Sindangresmi. Lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widjajanti & Sugiyanto, 2017) dengan judul penelitian **“gaya kepemimpinan dan Good Governance sebagai upaya peningkatan excellent service dan kepercayaan masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah)”** Inti dari peninjauan ini artinya buat mengkaji akibat gaya wewenang terhadap penggunaan standar administrasi yang baik dengan tujuan akhir mengupayakan bantuan luar biasa buat menciptakan agama warga terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah (Dinperindag Jateng). akibat penelitian menunjukkan bahwa secara holistik

survei wilayah memberikan bahwa penerapan tata kelola dan gaya wewenang yg baik di Divisi Perindustrian dan Perdagangan dievaluasi baik. Dinperindag sudah berhasil menyampaikan layanan berkualitas tinggi kepada anggota rakyat, serta kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut tinggi. Temuan lainnya merupakan menjadi berikut: 1) kepemimpinan transformasional bisa mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan rapikan kelola pemerintahan yang baik serta menyampaikan agama rakyat; dua) masa kepemimpinan yg singkat tidak dapat menerangkan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan; tiga) kinerja pelayanan yg baik akan mendatangkan kepercayaan rakyat; dan 4) penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat membentuk pelayanan prima yg selanjutnya akan menumbuhkan kepercayaan rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2015) dengan judul **“Peran Lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik suatu studi di kelurahan sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung”** Tujuan penelitian ini yaitu buat menentukan sejauh mana kiprah ketua desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik dicermati asal kepiawaian dan keterusterangan perangkat Pemerintah Daerah Sagerat yg luar biasa. dampak berasal investigasi ini dapat dicermati berasal kepiawaian dan keterusterangan yg mengesankan yg dikemukakan sang Buyung, khususnya kepada para pengelola pemerintahan yg bisa memberikan bantuan yang sederhana, cepat, sempurna dan menggunakan porto yg wajar serta menyerahkan data dan jaminan kemudahan dalam memperoleh data yang tepat serta memadai. konklusi mengenai profesionalisme penyelenggara pemerintahan di kecamatan Sagerat merupakan pegawai pemerintah pada kecamatan Sagerat lambat dalam merespon setiap pelayanan rakyat dan menyulitkan masyarakat umum pada mengakses berita.

Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2020) dengan judul **“kajian penerapan prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak”** Temuan penelitian ini membagikan bahwa rapikan kelola pemerintahan Kabupaten Lebak Iti Octavia sudah efektif. Administrasi yang baik terdiri asal beberapa baku, khususnya: kepentingan, kepolisian, arah kesepakatan, daya tanggap, kesetaraan, visi utama, tanggung jawab, kelangsungan hidup dan efektivitas, yg bisa dipenuhi oleh Pemerintahan Pemerintahan Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak berhak mendapatkan penghargaan atas kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik karena telah memenuhi sembilan prinsip

tersebut. ketika hendak menerapkan prinsip tata pemerintahan yg baik, pemerintah lain bisa memakai makalah ini menjadi contoh dan dasar evaluasi. buat kajian lebih lanjut, penekanan ini harus dilakukan menggunakan menggunakan pendekatan dekat dengan lembaga legislatif lain buat mengukur kemajuan pelaksanaan standar pemerintahan yg baik pada bidang pemerintahan wilayah.

Peneliti berkesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya berpegang teguh pada prinsip-prinsip rapikan kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup partisipasi, penegakan aturan, transparansi, orientasi mufakat, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Lebak berhak menerima penghargaan atas kinerja dan rapikan kelola pemerintahan yang baik sebab sudah memenuhi sembilan prinsip tadi. aturan dukungan tersebut ditunjukkan menggunakan mengikutsertakan wilayah dan berbagai kawan pada Musrenbang. di prinsipnya keadilan ditegakkan melalui penegakan hukum. misalnya saja menggunakan Peraturan Bupati Lebak nomor 34 Tahun 2018 ihwal panduan Penganggaran dan Perencanaan Responsif Gender. Kemudahan warga memperoleh berita berasal situs resmi pemerintah juga membagikan adanya transparansi.

F. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan

kepemimpinan merupakan salah satu pekerjaan administrasi yang sangat penting buat mencapai tujuan otoritatif. ada seseorang yg paling berpengaruh serta dapat diklaim menjadi pemimpin pada setiap kelompok rakyat, baik itu famili, tim olah raga, gerombolan kerja, atau organisasi jenis lainnya. Tanpa seorang pemimpin, suatu organisasi tidak hanya tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga menjadi kurang efisien. Inisiatif mencakup berbagai variabel dalam asosiasi seperti desain, permintaan, aliansi, kekuasaan dan keadaan alam, selain itu, inisiatif dapat menjadi alat untuk mengatasi beberapa masalah dalam asosiasi..(Nanang, 2010)

kepemimpinan yang ideal adalah fantasi atau keinginan setiap perkumpulan. Hal ini dapat membawa kebaikan bagi seluruh individu dari perkumpulan yang ada di dalamnya. Seorang pionir harus mempunyai jiwa administrasi yang berpengalaman, dan tentunya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap tatanan dan gerakan yang menjadi andalannya. Jika sebuah organisasi mengalami kelumpuhan, pemulihan dari kelumpuhan tersebut akan menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, administrasi ideal para eksekutif sangat diperlukan. Inisiatif yang dapat membawa kemajuan dan prestasi bagi perkumpulan.(Aditya et al., 2021)

Selanjutnya menurut George R.Terry menjelaskan terdapat sepuluh sifat pemimpin yang unggul yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan

Persyaratan mendasar bagi pemimpin yang dituntut bekerja dengan jam kerja panjang, shift tidak teratur, dan dalam situasi yang seringkali tidak menentu.

2. Stabilitas emosi

Para pionir hebat mempunyai perasaan yang stabil, yang berarti mereka tidak mudah marah, marah, dan tidak meledak-ledak di dalam hati. Ia toleran terhadap kekurangan orang lain, menghargai martabat orang lain, dan mampu memaafkan kesalahan yang tidak terlalu mendasar.

3. Pengetahuan tentang relasi insane

Mempromosikan dan mengembangkan bakat dan potensi bawahan pemimpin adalah salah satu tanggung jawab utama mereka, memastikan bahwa mereka dapat maju bersama dan sejahtera. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan dapat mengetahui sifat, watak, dan perilaku anggota kelompoknya sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pengikutnya berdasarkan tugas atau pekerjaan yang akan diberikan kepadanya.Kejujuran

4. Objektif

supaya objektif (tidak subjektif, berdasarkan berpretensi sendiri), keputusan pemimpin harus didasarkan di hati nurani yg higienis. beliau akan mencari bukti asli serta alasan untuk setiap episode dan memberikan motivasi yg wajar atas pemecatannya.

5. Dorongan pribadi

impian serta kesediaan untuk menjadi pemimpin itu wajib timbul berasal dalam hati sanubari sendiri. Dukungan asal luar akan memperkuat hasrat sendiri buat memberikan pelayanan dan pengabdian diri kepada kepentingan orang banyak.

6. Keterampilan berkomunikasi

Pemimpin diharapkan pandai menulis dan berbicara, cepat menangkap intisari pernyataan pihak luar, dan cepat memahami maksud anggotanya. Selain itu mahir mengkoordinasikan berbagai sumber energi manusia dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan sistem pendidikan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan..

7. Kemampuan mengajar

Pemimpin yang baik diharapkan menjadi guru yang baik yang bersedia memberikan loyalitas dan partisipasi bagi para pengikutnya.

8. Keterampilan sosial

Pemimpin juga diharapkan mampu “mengelola” orang lain guna membantu mereka mengembangkan bakat dan potensinya. Para pionir dapat melihat kekurangan dan kualitas masing-masing bagian, sehingga mereka dapat diturunkan ke tugas-tugas yang sesuai dengan atribut tunggalnya.

9. Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial

Pemimpin harus menguasai setidaknya satu keterampilan teknis tertentu. Selain itu memiliki kemampuan administratif untuk merancang, menetapkan, memeriksa keadaan, memutuskan, mengarahkan, mengendalikan dan memajukan keadaan yang tidak sehat. Intinya adalah untuk mencapai kecukupan kerja, tunjangan yang paling ekstrim dan kepuasan serta bantuan pemerintah dari berapa pun jumlah individu yang diperbolehkan..

Terdapat 5 indikator kepemimpinan yang dikemukakan oleh (Arifin et al., 2019) di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas untuk membangun partisipasi dan koneksi yang baik Berfokus pada membangun kolaborasi dan asosiasi yang baik dengan setiap pekerja. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu menginspirasi karyawannya.
2. Kemampuan yang efektivitas

Cobalah untuk dapat melanjutkan pekerjaan di luar kemampuannya jika diperlukan. Selain itu, pegawai dan pimpinan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, tiba tepat waktu, dan tidak terlambat.

3. Kepemimpinan yang partisipatif

Mengutamakan keputusan yang diambil setelah melalui musyawarah bersama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Selain itu, para pemimpin juga diharapkan dapat dengan cepat menyelidiki permasalahan di tempat kerja sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat.

4. Kemampuan dalam mendelegasikan tugas dan waktu

Para pionir seharusnya bisa membawa kepentingan bagi setiap individu dan hierarki ke kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan perkumpulan dalam melibatkan kelebihan waktu mereka untuk keperluan individu. Selain itu, kami selalu berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

5. Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang

pimpinan wajib mengutamakan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas mana yg harus ditangani sendiri, serta mana yg harus ditangani secara bersama. Pimpinan wajib selalu menyampaikan bimbingan serta pembinaan terhadap pengambilan keputusan pada para pegawai.

Menurut (Mutamimah 2001:3) dalam (Fahmi et al., 2024) menjelaskan seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mengubah bawahan melalui empat komponen utama, yaitu :

1. *Charismatic Leadership* (Karismatik/berpengaruh terhadap individu),
Seorang pemimpin memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Karyawan dituntut untuk mengembangkan keyakinan dan kepercayaan pada karyawan.
2. *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspiratif),
Pemimpin selalu memotivasi dan menginspirasi bawahannya dengan memberikan tugas yang bermakna dan menantang, serta menunjukkan semangat dan optimisme.
3. *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual),

Seorang pemimpin senantiasa mendorong bawahannya secara intelektual untuk menjadi inovatif dan kreatif dalam menemukan solusi baru untuk mengatasi masalah.

4. *Individualized Consideration* (Konsiderasi Individual),

Pemimpin memperhatikan setiap karyawan secara individual, seperti memperhatikan kebutuhan prestasi dan memberikan penawaran gaji yang sesuai.

Menurut Davis (dalam Reksohadiprojo dan Handoko, 2003), ada sepuluh ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam pemerintahan. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecerdasan (*intelligence*)

Penelitian-penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada pengikutnya, tetapi tidak sangat berbeda.

2. Kedewasaan, sosial dan hubungan sosial yang luas (*social maturity and breadth*)

Pemimpin cenderung mempunyai emosi yang stabil dan dewasa atau matang, serta mempunyai kegiatan dan perhatian yang luas.

3. Motivasi dan dorongan berprestasi

Pemimpin secara relatif mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi, mereka bekerja keras lebih untuk nilai intrinsik.

4. Sikap-sikap hubungan manusiawi

Seorang pemimpin yang sukses akan mengakui harga diri dan martabat pengikut-pengikutnya, mempunyai perhatian yang tinggi dan berorientasi pada bawahannya.

5. Memiliki pengaruh yang kuat

Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan orang lain atau bawahan agar berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela.

6. Memiliki pola hubungan yang baik

Seorang pemimpin sukses mampu menciptakan pola hubungan antar individu, dengan menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.

7. Memiliki sifat-sifat tertentu

Seorang pemimpin sukses memiliki sifat-sifat khusus seperti kepribadian baik, kemampuan tinggi dan kemauan keras, sehingga mampu menggarakkan bawahannya.

8. Memiliki kedudukan atau jabatan

Seorang pemimpin selalu memiliki kedudukan atau jabatan dalam organisasi, baik di pemerintahan maupun di masyarakat karena kepemimpinan merupakan serangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan jabatan dan gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.

9. Mampu berinteraksi

Seorang pemimpin yang baik akan selalu berinteraksi secara baik dengan sesama pemimpin, bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya, dalam situasi dan kondisi apa pun, buruk maupun menyenangkan.

10. Mampu memberdayakan

Seorang pemimpin yang sukses biasanya mampu memberdayakan bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya.

2. Tata Kelola Pemerintahan kalurahan

Desa diartikan menjadi kesatuan rakyat hukum yg memiliki batas wilayah dan berwenang buat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak berasal usul, serta/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yang dimaksud menggunakan Pemerintahan desa ialah penyelenggaraan usaha pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan awam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah desa, sinkron Peraturan angka 6 Tahun 2014 perihal desa, adalah kepala desa atau dianggap menggunakan nama lain, dibantu oleh Pemerintah

Kota sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemerintahan desa?Kalurahan. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1).

Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Setyowati, 2019)

Tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan good goverment untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kunci utama memahami tata kelola pemerintahan desa yang dikemukakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam (Universitas et al., 2020) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu: Pertama, prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Kedua, prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui ketiga prinsip good governance diharapkan dapat melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk berhak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan karakteristik desa masing-masing yang berarti desa sebagai wilayah otonom yang akan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sekarang lebih mengarah ke interaksi demokratik dengan adanya fenomena yaitu:

1. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari
2. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dengan adanya BPD dalam struktur organisasi desa
3. Semangat partisipasi masyarakat yang digalakkan oleh pemerintah saat ini

Peraturan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, Perangkat Desa terdiri atas :

- a) Sekretariat Desa
- b) Pelaksana Kewilayahan
- c) Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Indonesia sudah memasuki era digital ketika ini. taraf akses internet di Indonesia membagikan diagram yg terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah menyampaikan prioritas tinggi di pembangunan infrastruktur teknologi berita serta komunikasi untuk desa-desa terpencil. Otoritas publik ingin meningkatkan kecepatan peningkatan korespondensi serta inovasi data (TIK) dengan fokus pada mempercepat perubahan terkomputerisasi dalam organisasi pemerintah untuk mewujudkan administrasi terbuka yang efektif dan cepat di bidang pendidikan, kesejahteraan serta pemerintahan. Upaya menumbuhkan penemuan pada perkotaan, mengingat pandangan lain dalam pemugaran negara, dilakukan dengan menyampaikan apresiasi terhadap kecerdikan dan inovasi rakyat; sebagai akibatnya kemajuan inovasi diselesaikan secara partisipatif(Eko et al., 2014). Hal ini bisa dicapai dengan merangkul inovasi sinkron dengan kebutuhan wilayah kota terdekat sehingga kemajuan teknologi pada kota bergantung pada pembangunan kota, bukan diarahkan oleh orang-orang buangan. dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan atau e-Government hendaknya tidak hanya mengikuti tren dunia tetapi pula mengambil langkah strategis menuju peningkatan aksesibilitas dan kualitas

layanan, efisiensi dan efektivitas layanan, partisipasi rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan rapikan kelola yang baik. (Sulistiyowati et al., 2021)

Prinsip Tata Kelola Desa yaitu Akuntabilitas, Pengelolaan Profesional, Keterbukaan, Transparansi, Kebersihan, dan Efektifitas telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola yang baik di suatu desa dapat dilihat dari prinsip-prinsip panduan ini. Dimana partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi merupakan indikator utama. Keterlibatan semua pihak diperlukan untuk tata kelola desa yang efektif. Khususnya pihak-pihak yang secara politik diuntungkan dalam konteks demokrasi desa. Bila mencermati situasi unik ini, tentunya warga desa memiliki posisi penting serta sempurna sebagai pihak yang memang wajib dilibatkan dalam mewujudkan pemerintahan kota yang baik. asal daya penting buat melibatkan penduduk kota ialah menyampaikan akses data yg memadai serta seluas-luasnya. Pemerintah Desa juga secara implisit diwajibkan oleh UU Desa buat menyampaikan info sebanyak-banyaknya pada rakyat desa. menggunakan istilah lain, UU Desa menegaskan bahwa warga desa mempunyai hak buat mengetahui pelayanan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan aktualisasi pembangunan desa.

Selain itu, UU Desa bertujuan untuk mendorong masyarakat desa berinisiatif dan berpartisipasi dalam mengembangkan atau mengelola potensi dan aset desanya guna mencapai kesejahteraan, kemandirian, dan kesejahteraan. Tujuan-tujuan ini memerlukan adanya hubungan yang kooperatif dan dinamis antara kedua pihak, khususnya antara wilayah kota dari satu sudut pandang dan pemerintah kota dari sudut pandang yang lain. Oleh karena itu, pemerintah desa yang responsif dan masyarakat yang menghargai partisipasi sangat penting dalam hal ini. (Ra'is, 2022)

Secara garis besar setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sekaligus menjadi fokus modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yaitu:

1. Pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Perimbangan keuangan sebagai hasil antar Desa dengan Kabupaten

Salah satu masalah yang dihadapi dalam program percepatan modernisasi manajemen dan tatakelola pemerintahan desa adalah keterbatasan literatur atau buku pegangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan terutama pemerintah desa.

Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, responsibel, dinamis dan taat azas. Maka manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu dipahami agar dapat mengelola keuangan dan dana desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Jadi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu ditingkatkan dengan melakukan penataan administrasi agar lebih efisien dan efektif karena penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap administrasi dalam mendukung tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Good Governance

Good Governance merupakan pelaksanaan pemerintahan yang menjaga sinergi interaksi konstruktif antar domain dan solid, bertanggung jawab, serta efisien dikenal menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. dua konsep yg membuat definisi good governance ialah nilai-nilai yg membantu warga buat mencapai tujuan mereka yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi cita-cita dan asa rakyat. (Jefri, 2018)

Eksekusi administrasi yang baik mempengaruhi eksekusi pemerintahan. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai kemampuan mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada perkumpulan dalam menyelesaikan setiap kegiatannya. Jelas bahwa hal ini akan meningkatkan efisiensi pemerintah. Kinerja suatu organisasi pemerintah juga tidak akan terlalu terpengaruh oleh gaya kepemimpinan seseorang jika terdapat tata kelola yang baik. Dalam

menyempurnakan sistem manajemen suatu organisasi, tata kelola yang baik dapat menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Selain itu, pengendalian dan pemantauan manajemen dimasukkan dalam tata kelola yang baik guna meningkatkan kinerja. (Permatasari, 2020)

Berikut ini adalah ada beberapa pengertian Good Governance menurut para ahli :

1. Rosidin (dalam Dewi, 2018), mengatakan bahwa terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Adisasmita (2011), mengatakan bahwa arti good dalam kata good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini good governance berorientasi pada, yaitu yang pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan Nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan Nasional.
3. Addink (dalam Dewi, 2018), mengatakan bahwa konsep good governance dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu pemerintah dan bangsanya. Oleh karenanya, good governance merepresentasikan beberapa hal, seperti antara lain: 1) Hak-hak fundamental 2) Efektifitas dan transparansi 3) Akuntabilitas pemerintah (dalam hal masalah keuangan, dll) 4) Pengembangan aturan hukum (rule of law).
4. Sedarmayanti (2012), mengatakan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good

and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance.

Prinsip good governance adalah ketentuan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis (sejalan dengan sistem politik Indonesia), terbuka, bersih, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien (Delmana, 2019). Menurut Unified Country Improvement Program (UNDP), seperti yang dibahas dalam ulasan Heriyanto, ada beberapa standar dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Standar-standar ini terdiri dari: dukungan, kebijakan, arah kesepakatan, kesetaraan, visi penting, tanggung jawab, serta kecukupan dan produktivitas (Heriyanto, 2015).

1. Partisipasi

Partisipasi adalah tugas daerah dalam setiap proses menentukan arah dan strategi, serta menentukan sistem pemerintahan (Coryanata, 2016). Support mempunyai kemampuan sebagai info dan hasil. Dalam kemampuan informasi, dukungan ditunjukkan melalui perolehan data, penjawaban, perencanaan perbaikan, pelaksanaan, pengakuan dan evaluasi. Dengan cara ini, kerjasama dapat menyebabkan masyarakat tumbuh dengan bebas.

2. Penegak hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum yang adil sangatlah penting bagi kehidupan dimasyarakat, karena tanpanya kehidupan bernegara akan terus kacau, masyarakat tidak akan fokus pada kepentingan orang lain atau kelompok. Hasilnya, sistem hukum yang berfungsi akan dihubungkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerangka kerja ini terdiri dari pemrograman, peralatan, dan SDM. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum yang humanis, sehingga hukum harus ditegakkan dengan partisipasi tersebut.

3. Transparansi

Dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan, transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Proporsi pemerintahan yang baik adalah saat terdapat keterusterangan terhadap daerah setempat. Hal ini berlaku bagi pemerintah federal

maupun pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini, transparansi harus dilakukan dengan cara gamblang tidak ada yang ditutup-tutupi, baik terhadap jalannya rencana strategi maupun pelaksanaannya.

4. Daya tanggap

Untuk mewujudkan pemerintahan yang hebat, diperlukan suatu pemerintahan yang reseptif terhadap persoalan-persoalan daerah. Dalam konteks ini, daya tanggap merujuk pada bisa atau tidaknya pemerintah dalam memahami kebutuhan yang obyektif terhadap rakyat sebelum masyarakat menyampaikan keinginannya. Pemerintah harus mampu meneliti dan mengevaluasi kebutuhan masyarakat sebelum mewujudkan kebutuhan tersebut melalui kebijakan. (Calnen, 2010)

5. Keadilan

Sebagaimana dikutip dari Susanti pada Mardiasmo, keadilan ialah memperlakukan menggunakan adil atau setara pada memenuhi kebebasan bagi setiap pasangan yang penting buat dipahami serta sesuai menggunakan peraturan yang berlaku. (Susanti, 2014)

6. Visi strategis

Visi yang penting adalah ketika para pemimpin beserta masyarakat pada umumnya memiliki perspektif yang luas dan jauh mengenai administrasi besar dan pergantian peristiwa manusia. Tentu saja hal ini harus sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan. (Cahyadi, 2017). Visi strategis berhubungan dengan apakah pemerintah mempunyai atau tidak visi yang jelas, dan apakah visi tersebut sudah bisa diikuti oleh keberadaan misi yang juga jelas.

7. Orientasi konsesus

Untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi pihak masing-masing dan kebijakan serta langkah pemerintah, maka pemerintah perlu bertindak sebagai mediator kepentingan..

8. Akuntabilitas

Menurut Susanti, akuntabilitas adalah adanya kejelasan antara fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab bagi suatu organisasi. Dengan cara ini, tata kelola pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif. (Susanti, 2014). Akuntabilitas adalah

martabat seorang pemimpin dalam memperlihatkan tanggung jawab atas kebijakan dan proses pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah (Amirul et al., 2014).

9. Efektifitas dan efisiensi

Pemerintah dan lembaganya dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi. Dengan kata lain, pemerintah dapat menghasilkan peraturan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan tentang penjelasan konsep yang penulis gunakan dalam menganalisis suatu permasalahan berdasarkan permasalahan yang di angkat (Ningsih et al., 2017).

1. Kepemimpinan

kepemimpinan adalah seni mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan cara mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikannya. Sangat jelas bahwa kepemimpinan memainkan peran penting dalam sebuah organisasi.

2. Tata kelola pemerintahan kalurahan

Tata kelola pemerintahan desa adalah proses dimana pemerintah desa, yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat desa, mengelola, mengatur, dan memantau kebijakan dan sumber daya di tingkat desa.

3. Good governance

Good Governance adalah pelaksanaan perbaikan yang kuat dan penuh perhatian pada dewan yang sesuai dengan standar sistem berbasis suara dan sektor usaha yang mumpuni, menjauhkan diri dari kesalahan alokasi cadangan spekulasi dan mencegah penurunan nilai baik secara strategis maupun otoritatif, menjalankan disiplin moneter dan membuat keputusan yang sah dan politis. struktur untuk pengembangan latihan bisnis.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen penelitian yang memberikan batasan khusus untuk memahami faktor-faktor dalam mencapai tujuan penelitian dan memudahkan pembaca memahami kata-kata yang sulit dipahami dan jelas mencirikan suatu variabel (Chrisdianto, 2020).

Tabel 1.1 variabel definisi operasional

No	Variabel	Indikator
1	Good governance	1) Partisipasi, 2) transparansi, 3) penegakan hukum, 4) akuntabilitas, 5) daya tanggap, 6) keadilan, 7) visi strategis, 8) orientasi konsesus, 9) efektifitas dan efisiensi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Strategi pemeriksaan subyektif merupakan suatu teknik eksplorasi untuk menyampaikan deskriptif sebagai kata-kata yang disusun dan diungkapkan secara lisan dari individu

dan peristiwa yang diperhatikan. Penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis berdasarkan apa yang terjadi disebut penelitian deskriptif. Eksplorasi pencerahan subjektif akan berisi ekstrak informasi untuk memberikan gambaran mengenai tampilan laporan dan alat untuk pengumpulan informasi seperti rapat, informasi lapangan, foto, rekaman dan arsip otoritas lainnya. Jenis informasi yang diperoleh dari pemeriksaan ini adalah informasi penting dan informasi pilihan. Penelitian ini mendapatkan sumber data informan di instansi terkait dan Masyarakat yang memiliki lahan jagung itu sendiri dan juga pengamatan langsung.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Pleret Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan penulis ingin mengetahui peran kepemimpinan Kepala Kalurahan dalam membangun tata kolela pemerintahan menuju good governance.

3. Data dan sumber data

a) Data primer

Data primer dapat berupa hasil survei, wawancara, atau observasi langsung untuk tujuan penelitian tertentu. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya.

b) Data sekunder

Informasi tambahan mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui sumber tertulis, distribusi, kumpulan data, laporan, dan sumber data lainnya seperti artikel buku harian, buku, atau data dari komunikasi luas..

4. Teknik pengumpulan data

a) Observasi

Teknik observasi merupakan prosedur untuk secara efisien memperhatikan dan mencatat keanehan yang muncul di area pemeriksaan. Metode pengumpulan informasi diperoleh langsung dari hasil persepsi pakar itu sendiri.

b) Wawancara

Teknik Wawancara adalah suatu metode komunikasi yang bertujuan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian atau peneliti informal. Kemajuan saat ini menyiratkan bahwa siklus korespondensi dapat

dilakukan dengan berbagai cara, melalui telepon, SMS, email, dll. Hal ini dapat mempermudah pertemuan langsung dengan cepat. Namun dalam penelitian ini, pihak informal ditemui secara langsung atau diwawancara secara offline, sehingga penulis dapat mengamati permasalahan secara langsung. Dalam menentukan korban, ilmuwan memilih korban yang valid untuk menjawab permasalahan sesuai dengan titik pemeriksaan, dengan demikian informasi yang diberikan oleh korban adalah informasi yang benar sesuai dengan kebenaran atau kondisi yang terjadi sehingga memperoleh hasil yang baik.

Tabel 1.2 deskripsi informan berdasarkan jabatan

No	Jenis jabatan	jumlah
1	Lurah	1
2	Kasi Kalurahan/Jogoboyo	1
3	KAUR Kalurahan	1
4	Ketua PKK	1
5	Ketua BPD	1
6	Ketua RT	1
7	Karang Taruna	1

c) Dokumentasi

Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber referensi yang relevan seperti jurnal, buku dan media masa. Manfaat teknik dokumentasi adalah mampu memberikan informasi yang mendalam dan mengumpulkan referensi dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

5. Teknik analisis data

Menurut Ahmad Rijali analisis data adalah proses dengan sengaja mencari dan memilah catatan wawancara, catatan lapangan, dan berbagai materi yang Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda sendiri yang dapat menafsirkannya dan memberdayakan Anda untuk memperkenalkan apa yang Anda temukan kepada orang lain (Rijali, 2018).

a) Pengumpulan data

Dalam konteks pengumpulan data peneliti harus menggabungkan informasi yang diperoleh dari persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Data dari observasi berupa pengamatan langsung, data dari wawancara berupa pendapat, pandangan dan pengalaman dari pihak yang di wawancara dan data dari dokumentasi berupa kebijakan, dokumen-dokumen resmi atau laporan yang berkaitan dengan tujuan peneliti

b) Kondensasi data

Kondensasi data melibatkan pemilihan data yang relevan, pengerucutan fokus pada aspek penting dari data, penyederhanaan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan. Peringkasan data untuk mengidentifikasi tema utama dan transformasi data supaya lebih mudah dipahami.

c) Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan tabel, diagram, grafik, atau visualisasi lainnya. Penyajian data bertujuan untuk memvisualisasikan temuan dan pola-pola yang muncul dari analisis data agar dapat dengan jelas dipahami dan dieksplorasi lebih lanjut.

d) Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir menuju analisis informasi adalah membuat kesimpulan atau mengkonfirmasi penemuan yang telah ditemukan. Siklus ini mencakup penguraian informasi, mengenali penemuan-penemuan besar, dan membuat keputusan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Dengan membandingkan temuan analisis dengan data yang telah dikumpulkan, kesimpulan tersebut kemudian dapat diperkuat melalui verifikasi..

Dalam mengambil kesimpulan, penelitian ini merangkum temuan yang ditemukan selama analisis data dan mempertimbangkan implikasi yang relevan dengan konteks penelitian. Kesimpulan tersebut dapat menggambarkan dari permasalahan yang menjadi bahan penelitian bagi peneliti.